

EVALUASI PERBUP NO.28 TAHUN 2014 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SEKTOR PERTANIAN DI DESA KETAWANG KECAMATAN PURWOASRI KABUPATEN KEDIRI

Triana Ardianti¹, Dida Rahmadanik, S.AP., M.AP², Dra. Indah Murti, M.Si³

¹²³ Administrasi Negara, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember, 2025

Revised Desember, 2025

Accepted Desember, 2025

Available Desember, 2025

trianaardianti27@gmail.com

didarahma@untag-sby.ac.id

indah@untag-sby.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Evaluasi dilakukan dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product) melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih relevan bagi kebutuhan petani, namun akurasi data RDKK dan dinamika kebutuhan pupuk belum terpenuhi. Sumber daya dan fasilitas distribusi relatif memadai, tetapi pengawasan dan koordinasi antarinstansi masih lemah. Proses penyaluran mengalami keterlambatan dan ketidakmerataan distribusi. Secara hasil, kebijakan mampu menurunkan biaya produksi petani, tetapi belum mencapai prinsip enam tepat secara konsisten. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan belum optimal dan memerlukan perbaikan pada validitas data, koordinasi, dan mekanisme pengawasan.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan; pupuk bersubsidi; CIPP; distribusi pupuk.

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of Kediri Regent Regulation No. 28/2014 on subsidized fertilizer distribution in Ketawang Village, Purwoasri District. Using the CIPP evaluation model and a qualitative approach, the findings show that the policy remains relevant but faces issues with inaccurate RDKK data and fluctuating fertilizer demand. Resources and distribution facilities are adequate, yet monitoring and coordination remain weak. The distribution process experiences delays and uneven allocation. In terms of outcomes, the policy reduces production costs but has not consistently met the six accuracy principles. Overall, the implementation is not yet optimal and requires improvements in data validity, coordination, and oversight mechanisms.

Keywords : Policy evaluation; subsidized fertilizer; CIPP; fertilizer distribution.

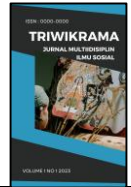
1. PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan penggerak penting perekonomian Indonesia, terutama bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup pada kegiatan usaha tani. Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, pupuk menjadi salah satu faktor produksi yang sangat menentukan. Namun, harga pupuk nonsubsidi yang relatif tinggi sering kali menjadi beban bagi petani, khususnya petani kecil. Kondisi inilah yang mendorong pemerintah untuk menyediakan pupuk bersubsidi agar petani dapat memperoleh sarana produksi dengan harga terjangkau.

Sebagai instrumen kebijakan fiskal, subsidi pupuk memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ketahanan pangan, meningkatkan hasil pertanian, serta memperkuat kesejahteraan petani. Pemerintah pusat menetapkan regulasi makro terkait pupuk bersubsidi, sementara pemerintah

*Corresponding author

E-mail addresses: trianaardianti@gmail.com



daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis, termasuk pendataan kebutuhan petani, distribusi, pengawasan, dan penyaluran melalui lini distributor hingga kios resmi (Kementrian Pertanian, 2021).

Di tingkat daerah, Kabupaten Kediri merupakan wilayah dengan basis pertanian yang kuat, ditandai dengan tingginya ketergantungan masyarakat pada komoditas padi, jagung, dan hortikultura. Desa Ketawang di Kecamatan Purwoasri adalah salah satu desa dengan aktivitas pertanian yang cukup intensif. Ketersediaan pupuk bersubsidi memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlanjutan usaha tani di desa tersebut. Namun demikian, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tidak selalu berjalan lancar. Berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kelangkaan pupuk pada periode tanam tertentu, serta ketidaksesuaian jumlah alokasi dengan kebutuhan aktual sering muncul di lapangan.

Untuk mengatur mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi, Pemerintah Kabupaten Kediri menetapkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014. Aturan ini mencakup prosedur pendataan, pengajuan alokasi, mekanisme distribusi, serta pengawasan agar pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani secara tepat sasaran. Namun dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi kepada petani, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, lemahnya sistem pengawasan, serta penyimpangan dalam distribusi.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perbup No. 28 Tahun 2014 untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi dalam penelitian ini menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang menilai kebijakan secara komprehensif mulai dari relevansi kebutuhan, kesiapan sumber daya, efektivitas proses implementasi, hingga hasil akhir kebijakan bagi petani. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul **“Evaluasi Perbup No. 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya Penguatan Sektor Pertanian di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri.”**

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan atau keputusan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dalam penyelesaian masalah publik. Menurut Dye (2017), kebijakan publik adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial karena menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi yang efektif memerlukan koordinasi, sumber daya, serta mekanisme pengawasan yang baik agar kebijakan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan. Dalam konteks kebijakan daerah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan lokal. Oleh sebab itu, kualitas implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah, kemampuan birokrasi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat

Evaluasi kebijakan

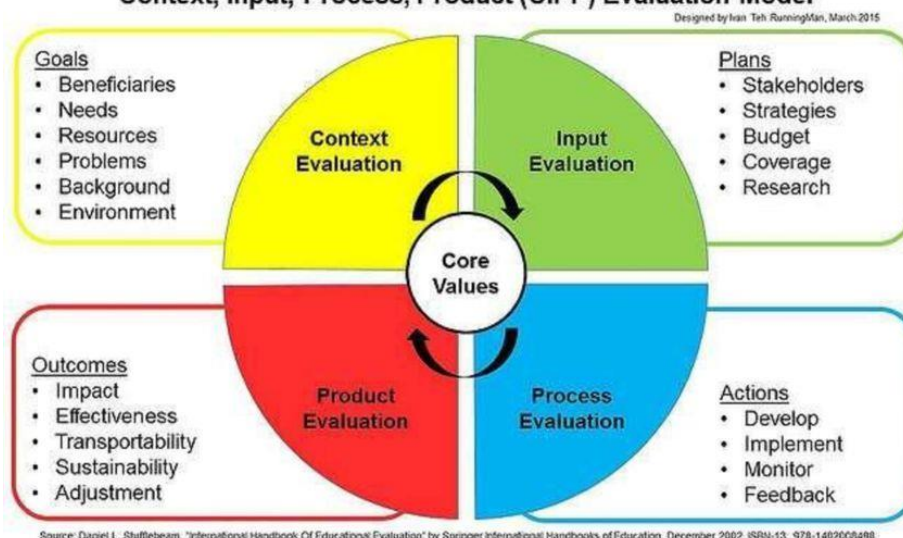
Evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian sistematis terhadap efektivitas suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dunn (2018) menegaskan bahwa evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kebijakan, mengidentifikasi hambatan, dan memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan. Evaluasi kebijakan tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga menilai proses pelaksanaan, sumber daya yang digunakan, serta relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.

Evaluasi sangat penting dalam kebijakan distribusi pupuk bersubsidi karena kompleksitas rantai distribusi, potensi penyimpangan, serta dinamika kebutuhan petani yang selalu berubah.

Model Evaluasi Kebijakan

Model CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003) merupakan salah satu pendekatan evaluasi komprehensif yang banyak digunakan dalam penelitian kebijakan publik. Pada bagian Context disini menilai kebutuhan, latar belakang masalah, dan relevansi kebijakan. Selanjutnya pada bagian Input, mengkaji sumber daya, strategi, dan dukungan yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan. Lalu Process untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, efektivitas koordinasi, serta hambatan yang muncul. Tahap selanjutnya yaitu Product untuk menilai hasil kebijakan, baik output maupun dampak terhadap masyarakat. Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai keberjalanan kebijakan, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam konteks pupuk bersubsidi, CIPP membantu menilai keakuratan data RDKK, kecukupan sarana distribusi, proses penyaluran, hingga dampak terhadap produksi pertanian.

Gambar Model Evaluasi CIPP Daniel Stufflebeam
Context, Input, Process, Product (CIPP) Evaluation Model



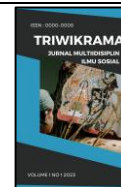
Sumber : The CIPP Evaluation Model: How to Evaluate for Improvement and Accountability oleh Daniel L. Stufflebeam & Guili Zhang (2017).

2. METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang berfokus pada pengamatan fenomena atau gejala yang terjadi secara alami (Abdussamad, 2021). Penelitian kualitatif berlandaskan naturalis dan bersumber pada pengamatan lingkungan. Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian kualitatif yang mendeskripsikan makna dari data atau fenomena yang diamati oleh peneliti dan disertai dengan penyajian bukti-bukti yang mendukung. Pemahaman terhadap fenomena tersebut sangat dipengaruhi oleh keahlian dan ketelitian peneliti dalam melakukan analisis. Peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mereduksi dan memurnikan sehingga diperoleh makna fenomena yang sesungguhnya (Nasution, 2023).

*Corresponding author

E-mail addresses: trianaardianti@gmail.com



Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam proses penyaluran pupuk bersubsidi, meliputi aparat desa, petugas distributor, pemilik kios resmi, dan petani penerima subsidi. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan realisasi penyaluran pupuk, data RDKK, arsip desa, serta referensi ilmiah yang relevan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala dalam implementasi kebijakan pupuk bersubsidi. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme distribusi, kondisi kios, dan praktik penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ketawang. Studi dokumentasi meliputi penelaahan dokumen Perbup No. 28 Tahun 2014, data alokasi dan realisasi pupuk bersubsidi, laporan pertanian, serta arsip administrasi kelompok tani. Ketiga teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai konteks, input, proses, dan hasil kebijakan sesuai pendekatan evaluasi CIPP.

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data lapangan yang telah terkumpul direduksi dengan cara mengelompokkan informasi sesuai empat komponen evaluasi CIPP. Pada bagian Context, peneliti menganalisis kebutuhan, relevansi kebijakan, dan kondisi lingkungan. Pada Input, peneliti menilai terhadap sumber daya, sarana prasarana, dan mekanisme pendukung. Pada Process, peneliti melakukan evaluasi pelaksanaan distribusi, koordinasi, dan hambatan yang muncul. Langkah terakhir yaitu Product, peneliti menganalisis hasil kebijakan terhadap efektivitas penyaluran dan dampaknya bagi petani. Validitas data diperkuat dengan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga interpretasi hasil evaluasi lebih akurat dan kredibel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

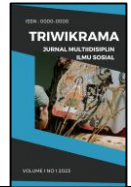
HASIL

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu wilayah agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Komoditas utama di wilayah ini antara lain padi, jagung, dan tanaman hortikultura. Berdasarkan data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri (2024), Desa Ketawang memiliki luas lahan pertanian sekitar 80,04 hektar, dengan total alokasi pupuk bersubsidi jenis Urea sebanyak 10.547 kg (60%), NPK sebanyak 7.042 kg (40%), dan NPK formula 0 kg. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik dan dinamika yang menarik dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi, khususnya terkait ketidaksesuaian antara data RDKK dan realisasi lapangan, serta permasalahan keterlambatan distribusi pupuk yang sering terjadi saat musim tanam.

Penyajian data

Data hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan lima kategori informan sesuai pedoman, yaitu pejabat/staf Dinas Pertanian, ketua Gapoktan, anggota kelompok tani,



distributor/pengecer pupuk bersubsidi, serta petani penerima dan non-penerima pupuk. Data disajikan dan dikelompokkan sesuai model CIPP (Context, Input, Process, Product).

Konteks penelitian menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya Perbup No. 28 Tahun 2014, serta relevansinya terhadap kebutuhan petani di Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian, Perbup No. 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk mengatur tata cara penyaluran pupuk bersubsidi agar lebih terarah, transparan, dan tepat sasaran. Sebelum adanya kebijakan ini, banyak keluhan dari petani mengenai kelangkaan pupuk, harga pupuk yang tinggi, serta penyaluran yang tidak merata. *“Dulu sebelum ada peraturan bupati, distribusi pupuk sering tidak jelas. Ada petani yang dapat lebih, ada yang malah tidak bagian. Sekarang dengan RDKK, semuanya harus terdata,”* (Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kediri).

Ketua Gapoktan Desa Ketawang menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan prosedur bagi kelompok tani, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan atau ketidaktepatan jumlah pupuk. *“Perbup ini bagus sebenarnya, karena menertibkan data. Tapi kadang realisasinya tidak sesuai, yang diminta 100 zak kadang datang 70 saja,”* (Ketua Gapoktan Ketawang).

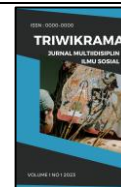
Dari sisi petani, sebagian besar menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi membantu meringankan beban biaya produksi, terutama bagi petani kecil. Namun, petani non-penerima menilai bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya adil, karena masih ada petani yang memiliki lahan kecil tetapi tidak terdaftar dalam RDKK. *“Yang dapat subsidi memang terasa ringan biayanya, tapi kami yang tidak terdaftar ya tetap beli pupuk nonsubsidi, mahal sekali,”* (Petani non-penerima). Secara umum, konteks kebijakan ini masih relevan dengan kebutuhan petani, namun perlu perbaikan dalam pendataan penerima manfaat dan pemerataan alokasi pupuk.

Komponen input menilai kesiapan perencanaan, sumber daya, dan sarana pendukung implementasi kebijakan. Dinas Pertanian menjelaskan bahwa proses penyusunan RDKK dilakukan setiap tahun dengan pendampingan penyuluh pertanian. Namun, kendala muncul karena data lahan dan anggota kelompok tani tidak selalu diperbarui secara akurat. Hal ini berdampak pada perbedaan antara kebutuhan pupuk yang diusulkan dan realisasi di lapangan. *“Kadang data lahan belum diperbarui. Ada petani yang sudah tidak aktif tapi masih terdaftar di RDKK, sebaliknya ada petani baru belum masuk data,”* (Penyuluh pertanian lapangan).

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan kios pupuk lengkap (KPL) sudah mencukupi, tetapi beberapa wilayah pinggiran masih kesulitan akses karena jarak dari gudang distributor cukup jauh. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran pupuk ke tingkat petani. Sementara itu, distributor dan pengecer mengaku bahwa pasokan pupuk dari produsen (PT Petrokimia Gresik) sering terlambat datang, terutama menjelang musim tanam serentak. *“Kami hanya bisa menyalurkan sesuai pasokan dari atas. Kadang jatah turun terlambat, akhirnya petani menunggu lama,”* (Distributor pupuk bersubsidi).

Dari sisi anggaran, tidak ada kendala berarti karena subsidi ditanggung pemerintah pusat. Namun, pengawasan terhadap kuota pupuk di tingkat kelompok masih lemah, sehingga rawan penyelewengan. Secara keseluruhan, aspek input sudah berjalan sesuai pedoman, namun belum optimal karena lemahnya validasi data RDKK, kurangnya tenaga penyuluh, dan keterbatasan sarana distribusi.

Pada tahap proses, penelitian menemukan bahwa mekanisme distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri sudah memiliki alur baku. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala di lapangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi antara Dinas Pertanian, distributor, dan kelompok tani belum berjalan maksimal. Kadang informasi mengenai waktu



penyaluran pupuk tidak tersampaikan dengan cepat, sehingga terjadi penundaan penebusan pupuk oleh petani. *“Kadang pupuk sudah sampai di kios tapi petani belum tahu. Sebaliknya, petani datang tapi pupuk belum datang dari distributor,”* (Ketua kelompok tani).

Dari sisi pengawasan, Dinas Pertanian telah melakukan monitoring berkala, namun keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan tidak merata di semua kecamatan. *“Penyuluh pertanian lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian hanya satu orang dalam satu kecamatan,”* (Anggota Kelompok Tani). Selain itu, transparansi data penerima pupuk di tingkat desa masih rendah, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial antar petani. *“Pupuk Subsidi semua dapat, yang tidak dapat itu yang tidak mengajukan RDKK. Untuk syarat pengajuan RDKK yaitu fotocopy KTP, KK, dan pipil pajak sawah”* (Penyuluh pertanian lapangan).

Dalam prosesnya, RDKK sistemnya pengajuan ke kelompok tani lalu diserahkan ke ketua Gapoktan dan disetor ke Balai Penyuluh Pertanian (BPP). Meskipun sudah terdata dan tertata, masih terdapat penyelewengan di lapangan. *“Saya sudah mengajukan RDKK, namun KTP saya tidak valid. Padahal dalam syarat yang tertera maksimal luas lahan 2 hektar untuk satu nama, sedangkan luas lahan saya tidak sampai 2 hektar,”* (Petani Non-penerima). *“KTP tidak valid sebenarnya sudah kami ajukan tapi tidak masuk sistem RDKK, mungkin ada nama kembar yang lebih dari 2 hektar atau misalkan pengajuan lebih dari 2 hektar,”* (Ketua Gapoktan).

Namun, masih ditemukan beberapa penyelewengan seperti adanya beberapa petani yang mendapatkan pupuk subsidi padahal sawahnya lebih dari 2 hektar. Hal itu terjadi karena petani tersebut meminjam KTP/nama petani lain supaya jatah pupuk nya bertambah dan kondisi tersebut masih berjalan hingga saat ini. Anggota kelompok tani juga mengeluhkan bahwa pupuk yang diterima sering tidak sesuai jumlah kebutuhan lahan dan terkadang distribusinya tidak tepat waktu, khususnya saat musim hujan dan masa tanam serentak. *“Kami biasanya dapat pupuk terlambat, padahal waktu tanam sudah jalan. Akhirnya harus beli pupuk nonsubsidi dulu,”* (Petani penerima pupuk subsidi). Meskipun begitu, komunikasi internal antara kelompok tani dan penyuluh sudah cukup baik, dan para petani tetap aktif menyusun RDKK setiap tahun sebagai bentuk partisipasi mereka.

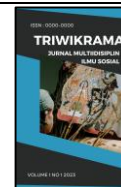
Komponen produk menilai hasil dan dampak kebijakan terhadap petani dan sektor pertanian. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa kebijakan pupuk bersubsidi berdampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi. Petani penerima pupuk bersubsidi mampu menekan pengeluaran hingga 20-30% dibanding sebelum ada program subsidi. *“Kalau beli pupuk nonsubsidi satu sak bisa 200 ribu lebih, tapi kalau subsidi cuma 120 ribu, jelas membantu,”* (Petani penerima).

Dari sisi produktivitas, para petani di Desa Ketawang merasakan peningkatan hasil panen, terutama pada komoditas jagung dan padi. Namun, sebagian petani mengeluhkan bahwa ketidakseimbangan jenis pupuk (terlalu banyak Urea, sedikit NPK) menyebabkan tanah menjadi keras dan menurunkan kualitas hasil pada musim berikutnya. *“Kami terlalu sering pakai Urea karena NPK susah didapat. Lama-lama tanahnya keras, hasilnya menurun,”* (Ketua Gapoktan).

Sementara itu, dari sisi sosial, kebijakan ini mampu meningkatkan semangat petani untuk terus bertani karena merasa diperhatikan oleh pemerintah. Namun, aspek keadilan dan pemerataan distribusi masih menjadi pekerjaan rumah, karena masih ada petani yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh subsidi. *“Bagi yang dapat subsidi, jelas semangat, tapi yang tidak dapat justru kecewa. Harusnya pemerintah perbarui datanya,”* (Petani non-penerima).

PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini menjelaskan temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan di Desa Ketawang, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu “Bagaimana



evaluasi kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri”. Analisis dalam pembahasan ini menggunakan model evaluasi kebijakan CIPP (Context, Input, Process, Product) yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam, dengan mengacu pada teori evaluasi kebijakan publik yang memandang kebijakan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana tujuan, pelaksanaan, dan hasil kebijakan telah sesuai dengan harapan masyarakat.

Komponen Context

Komponen context dalam evaluasi CIPP digunakan untuk menilai latar belakang, kebutuhan, dan relevansi kebijakan terhadap kondisi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjawab kebutuhan petani terhadap ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, sekaligus mengatasi permasalahan kelangkaan dan penyelewengan distribusi pupuk yang sering terjadi sebelum adanya kebijakan ini.

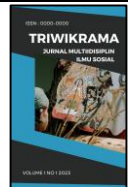
Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian dan kelompok tani, diketahui bahwa kebijakan ini dianggap masih relevan dan dibutuhkan oleh petani di Kabupaten Kediri, terutama untuk menjaga ketahanan pangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih muncul persoalan seperti ketidaksesuaian data penerima pupuk, perbedaan kuota antar kelompok, serta belum meratanya akses pupuk di semua wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara konteks, kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 sudah tepat secara tujuan dan kebutuhan, tetapi masih memerlukan pembaruan sistem agar lebih adaptif dengan kondisi terkini di lapangan, terutama dalam hal pendataan lahan dan petani penerima subsidi.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Valeriana Darwis dan Supriyati (2014) yang menyatakan bahwa kebijakan subsidi pupuk secara umum relevan, namun efektivitasnya masih terganggu oleh lemahnya sistem pendataan dan distribusi. Artinya, dari sisi konteks, kebijakan ini memiliki dasar yang kuat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat tani, tetapi perlu penyesuaian agar tetap tepat sasaran. Penelitian Darwis & Supriyati juga menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang menekankan pentingnya kesesuaian context dan input sebagai dasar efektivitas kebijakan subsidi pupuk. Penelitian mereka menyatakan bahwa kebijakan yang baik harus didasari kebutuhan dan relevansi (context), efektivitas sangat bergantung pada kualitas data, SDM, dan sarana (input).

Hal ini selaras dengan penelitian ini yang juga menemukan bahwa Perbup No. 28 Tahun 2014 masih relevan dengan kebutuhan petani (context), namun masih terdapat masalah pada akurasi data RDKK dan ketersediaan SDM penyuluh (input). Persamaannya sama-sama berangkat dari prinsip bahwa kebijakan hanya efektif bila konteks kebutuhannya tepat dan input pelaksanaannya kuat dan sejalan dengan teori dasar model CIPP.

Komponen Input

Komponen input menilai sumber daya, strategi, dan sarana pendukung yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, proses perencanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Kediri dilakukan melalui mekanisme Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun oleh kelompok tani dan diverifikasi oleh Dinas Pertanian. Namun, beberapa informan menyatakan bahwa data RDKK tidak selalu mutakhir, karena masih terdapat nama-nama petani yang sudah tidak aktif, serta petani baru yang belum terdaftar. Selain itu, ketersediaan sumber daya manusia penyuluh pertanian dinilai masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap kelompok tani belum maksimal. Dari sisi sarana dan prasarana, jumlah kios pupuk lengkap (KPL) sudah mencukupi,



namun jarak gudang distributor dengan wilayah kelompok tani tertentu cukup jauh, menyebabkan keterlambatan distribusi pada masa tanam tertentu.

Dalam perspektif evaluasi kebijakan, kelemahan pada aspek input ini menunjukkan bahwa perencanaan teknis dan dukungan sumber daya belum optimal untuk mencapai hasil kebijakan yang diharapkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ragimun, Makmun, dan Sigit Setiawan (2020) yang menyebutkan bahwa efektivitas kebijakan subsidi pupuk sangat dipengaruhi oleh keakuratan data dan peran aktif aparat pertanian dalam pembinaan petani. Dengan demikian, untuk memperbaiki aspek input, perlu adanya validasi data penerima pupuk secara berkala, peningkatan kapasitas SDM pertanian, dan penguatan sistem distribusi berbasis data digital agar penyaluran pupuk lebih efisien dan tepat sasaran.

Penelitian tersebut menekankan bahwa keberhasilan evaluasi kebijakan subsidi pupuk memerlukan perhatian pada komponen proses, terutama koordinasi, mekanisme penyaluran, dan pengawasan. Penelitian ini juga menemukan bahwa komponen process sangat menentukan efektivitas kebijakan, sesuai teori CIPP bahwa process evaluation dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan implementasi dan menilai apakah mekanisme pelaksanaan sudah sejalan dengan desain kebijakan. Persamaannya sama-sama menempatkan process evaluation sebagai penentu efektif tidaknya kebijakan, sesuai teori CIPP dan teori evaluasi kebijakan publik.

Komponen Process

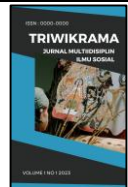
Komponen process berfokus pada pelaksanaan kebijakan di lapangan, meliputi mekanisme distribusi, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan selama proses penyaluran pupuk berlangsung. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi telah mengikuti alur resmi yang diatur pemerintah, yaitu dari produsen ke distributor lalu pengecer/kios ke kelompok tani dan diterima oleh petani. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan keterlambatan pengiriman, ketidaktepatan jumlah, dan perbedaan informasi antara pihak Dinas, distributor, dan kelompok tani. Selain itu, pengawasan di tingkat bawah masih terbatas karena jumlah penyuluh pertanian yang minim serta kurangnya transparansi data penerima di tingkat kelompok. Kondisi ini menimbulkan potensi kecemburuan sosial antar petani, terutama antara petani penerima dan non-penerima subsidi.

Dari sudut pandang evaluasi kebijakan, permasalahan ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan belum sepenuhnya efektif dan efisien, meskipun prosedur administrasi sudah tersedia. Proses distribusi pupuk di lapangan masih memerlukan sinkronisasi antar lembaga dan penegakan sistem pengawasan yang lebih kuat, agar kebijakan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga berdampak nyata bagi seluruh petani. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Ikham Kholis dan Khasan Setiaji (2020) yang mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi, koordinasi antar aktor dan efektivitas komunikasi menjadi faktor penting agar penyaluran pupuk tepat waktu dan sesuai sasaran. Dengan demikian, aspek process dalam evaluasi ini menunjukkan bahwa kebijakan sudah berjalan, tetapi belum optimal karena masih terhambat oleh koordinasi, pengawasan, dan perbedaan data antara instansi terkait.

Penelitian mereka, meskipun berfokus pada penyaluran pupuk bersubsidi pada petani padi, menggunakan kerangka evaluasi yang serupa, yakni efektivitas kebijakan diukur melalui input, proses distribusi, serta hasil (product) berupa dampak terhadap petani. Perspektif ini sejalan dengan model CIPP yang digunakan dalam penelitian ini. Keduanya menilai efektivitas kebijakan melalui kecukupan data dan perencanaan (input), kelancaran proses penyaluran (process), dan hasil berupa produktivitas petani (product). Persamaannya sama-sama memaknai efektivitas kebijakan melalui kerangka evaluasi yang terpadu dan berorientasi pada dampak.

Komponen Product

Komponen product digunakan untuk menilai hasil, dampak, dan manfaat kebijakan terhadap masyarakat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas petani menyatakan bahwa



kebijakan pupuk bersubsidi memberikan manfaat nyata dalam meringankan biaya produksi dan meningkatkan hasil panen. Sebelum adanya subsidi, petani harus membeli pupuk dengan harga tinggi, sementara setelah kebijakan diberlakukan, biaya pemupukan dapat ditekan hingga 20-30%. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya dampak yang belum sesuai harapan, yaitu ketimpangan distribusi antara petani penerima dan non-penerima subsidi, serta ketidakseimbangan jenis pupuk (dominan Urea, sedikit NPK) yang menyebabkan penurunan kualitas tanah dalam jangka panjang. Dari sisi sosial, kebijakan ini berdampak positif karena meningkatkan semangat petani untuk tetap bertani. Tetapi dari sisi keadilan, kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip pemerataan, karena masih ada kelompok tani kecil yang tidak terakomodasi dalam daftar penerima pupuk.

Menurut teori evaluasi kebijakan publik, evaluasi hasil kebijakan tidak hanya diukur dari pencapaian target output (seperti jumlah pupuk tersalurkan), tetapi juga harus mempertimbangkan outcome (dampak bagi masyarakat) dan sustainability (keberlanjutan). Dengan demikian, meskipun kebijakan ini telah berhasil meningkatkan produktivitas, perlu upaya lanjutan agar hasil kebijakan berkelanjutan dan merata bagi semua petani.

Penemuan ini juga memperkuat hasil penelitian Maman, Aminudin, dan Novriana (2011) yang menegaskan bahwa kebijakan subsidi pupuk mampu meningkatkan produktivitas pertanian, tetapi perlu dikombinasikan dengan kebijakan penggunaan pupuk berimbang agar tanah tetap subur dalam jangka panjang. Penelitian tersebut menggunakan landasan teori evaluasi hasil kebijakan yang menilai produktivitas petani sebagai ukuran keberhasilan (product evaluation). Mereka menegaskan bahwa evaluasi kebijakan tidak berhenti pada output administratif, tetapi perlu mengukur outcome berupa peningkatan hasil panen, efisiensi biaya, kesejahteraan petani. Penelitian ini juga menerapkan prinsip teori tersebut, karena menilai efektivitas kebijakan melalui peningkatan produktivitas, manfaat ekonomi, dan keberlanjutan penggunaan pupuk. Persamaannya sama-sama berpijak pada teori evaluasi produk dalam model CIPP yang menilai hasil kebijakan melalui outcome nyata bagi masyarakat.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

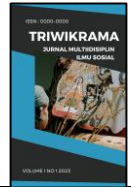
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagai Upaya Membantu Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri”, dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Dari aspek Context (Konteks)

Kebijakan Peraturan Bupati Kediri Nomor 28 Tahun 2014 diterbitkan untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang terjangkau serta mencegah kelangkaan pupuk di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan ini dinilai masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan petani di Kabupaten Kediri karena mampu membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah. Namun demikian, terdapat kendala dalam aspek pemerataan penerima pupuk bersubsidi, di mana sebagian petani kecil belum sepenuhnya terakomodasi dalam daftar penerima manfaat.

- 2) Dari aspek Input (Masukan)

Kesiapan sumber daya manusia, sarana, dan sistem perencanaan kebijakan sudah tersedia, namun belum sepenuhnya optimal. Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan



Kelompok (RDKK) masih menghadapi kendala pada akurasi data petani dan luas lahan, sementara jumlah penyuluh pertanian dan pengawasan lapangan masih terbatas. Selain itu, sarana distribusi pupuk di beberapa wilayah belum merata, sehingga menyebabkan keterlambatan pengiriman pupuk pada waktu tanam tertentu.

3) Dari aspek Process (Proses)

Mekanisme pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk telah mengikuti prosedur yang berlaku, yaitu melalui jalur produsen - distributor - pengecer/kios - kelompok tani - petani. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan ketidaktepatan waktu distribusi, perbedaan informasi antar pihak, serta lemahnya koordinasi dan transparansi data. Hal ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berjalan, tetapi belum efektif sepenuhnya dalam mencapai prinsip enam tepat (tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat tempat, dan tepat sasaran).

4) Dari aspek Product (Produk)

Hasil kebijakan menunjukkan bahwa pupuk bersubsidi memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil panen dan efisiensi biaya produksi petani. Petani penerima subsidi mampu menekan biaya pemupukan dan meningkatkan hasil pertanian dibanding sebelum kebijakan diterapkan. Meskipun demikian, masih terdapat masalah dalam pemerataan penerimaan pupuk dan ketidakseimbangan penggunaan jenis pupuk (terlalu dominan Urea) yang dapat memengaruhi kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan Perbup No. 28 Tahun 2014 sudah berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi petani, tetapi belum optimal secara menyeluruh. Aspek yang masih perlu diperbaiki meliputi pembaruan data penerima subsidi, peningkatan kapasitas pengawasan, dan pemerataan distribusi pupuk di tingkat desa agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Saran

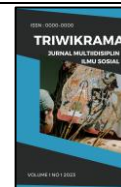
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, instansi terkait, dan penelitian selanjutnya, yaitu:

1) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri

- Perlu dilakukan evaluasi dan pembaruan data RDKK secara berkala dengan melibatkan penyuluh pertanian dan kelompok tani agar data penerima pupuk subsidi benar-benar akurat dan mutakhir.
- Meningkatkan koordinasi lintas sektor antara Dinas Pertanian, distributor, pengecer, dan kelompok tani untuk memastikan distribusi pupuk berlangsung tepat waktu dan sesuai kuota.
- Melakukan pengawasan lapangan secara rutin dan transparan, dengan melibatkan perangkat desa dan kelompok tani agar penyaluran pupuk lebih akuntabel dan menghindari penyelewengan.

2) Bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri

- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani.
- Memanfaatkan teknologi digitalisasi pendataan dan pelaporan distribusi pupuk untuk mempermudah pengawasan dan mempercepat proses verifikasi data RDKK.
- Meninjau kembali proporsi jenis pupuk bersubsidi, agar tidak hanya berfokus pada Urea tetapi juga memperhatikan kebutuhan pupuk berimbang seperti NPK dan organik.



3) Bagi Kelompok Tani dan Gapoktan

- Diharapkan lebih aktif dalam menyusun dan memperbarui data RDKK, serta melakukan musyawarah internal untuk memastikan kebutuhan anggota kelompok terakomodasi dengan baik.
- Meningkatkan transparansi dalam pendataan dan penyaluran pupuk, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antarpetani.

4) Bagi Penelitian Selanjutnya

- Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau kombinasi (mixed methods) untuk mengukur efektivitas kebijakan secara lebih terukur melalui indikator kinerja dan kepuasan petani.
- Penelitian berikutnya juga dapat memperluas fokus pada dampak jangka panjang kebijakan subsidi pupuk terhadap kesuburan tanah dan keberlanjutan lingkungan pertanian di Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi serta memperkuat sistem evaluasi kebijakan publik di sektor pertanian agar lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian KUALITATIF*. Makassar: Syakir Media Press.

Nasution, A. F. (2023). *METODE PENELITIAN KUALTATIF*. Bandung: Harfa Creative.

Carolina, M., & Wulandari, S. (2024). Evaluasi Subsidi Pupuk dan Rencana Bantuan Langsung Pupuk. *Buletin APBN*, IX(1), 3-7.

Darwis, V., & Supriyati, N. (2016). Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 11(1), 45. <https://doi.org/10.21082/akp.v11n1.2013.45-60>

Hadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2020). Dampak Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pangan Terhadap Ketahanan Pangan Indonesia. *Responsive*, 2(3), 122. <https://doi.org/10.24198/responsive.v2i3.26085>

Ibrahim, M. Y. (2021). Pemberian Pupuk Bersubsidi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani. *Fenomena*, 19(2), 125. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v19i2.1464>

Kementerian Pertanian. (2021). Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Salinan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia, 1-161.

Kirani, M. (2024). Efektivitas Program Kartu Tani Dalam Distribusi Pupuk Bersubsidi Di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. *Jurnal UIN Prof. Kh Saifuddin Zuhri*, 2(1).

Maharani, N. P. (2018). Implementasi Kebijakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Wilayah Jawa Timur.

Nadziroh, M. N. (2020). Peran Sektor Pertanian Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Magetan. *Jurnal Agristan*, 2(1), 52-60. <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2348>